

# PENDUDUK PRIBUMI DALAM POLITIK PERTOLONGAN BENCANA KRAKATAU 1883

## (THE AID FOR THE LOCAL RESIDENTS IN THE 1883 KRAKATAU'S DISASTER POLITICS)

Erlita Tantri

Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI)  
erlita\_tantri13@yahoo.com

### Abstrak

Letusan Krakatau 26-27 Agustus 1883 merupakan salah satu bencana vulkanik terbesar dan terdasyat di abad 19 setelah Gunung Tambora (1815). Letusan Krakatau 1883 telah menyebabkan jumlah korban yang besar dan kerusakan berat, baik bagi lingkungan maupun infrastruktur rakyat dan pemerintah, dampak dari letusan berupa material vulkanik dan gelombang besar tsunami. Informasi letusan dan dampaknya ini menyebar ke penjuru dunia dan mengundang perhatian dan sumbangan dana untuk para korban bencana. Secara bergelombang bantuan dari nusantara dan masyarakat internasional mengalir ke kantung bantuan bencana yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, bagaimakah bantuan pertolongan pascabencana yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, terutama untuk penduduk lokal yang menjadi korban terbesar dalam peristiwa letusan Krakatau ini? Efektifkah pengelolaan dana bantuan untuk korban bencana yang dilakukan oleh pemerintah Belanda? Melalui studi literatur dengan sumber laporan bantuan bencana Krakatau yang ditulis oleh Belanda dan syair dari penduduk lokal sebagai saksi mata, tulisan ini ingin melihat politik bencana kolonial Belanda, terutama dalam peristiwa bencana Krakatau di Banten dan Lampung.

**Kata Kunci :** Gunung Berapi, Krakatau, Kolonial Belanda, Etnis, Penduduk Lokal, Eropa, Cina, Bantuan Dan Pemulihan Pascabencana.

### PENDAHULUAN

Dalam sebuah film berjudul "Krakatoa, the Last Day" yang diproduksi oleh British Broadcasting Cooperation – BBC (2006), digambarkan bagaimana bencana letusan Gunung Krakatau yang diikuti oleh gelombang tsunami yang dasyat menghantam perkampungan di pesisir Banten dan Lampung. Film yang didasari oleh catatan pribadi seorang pegawai

### Abstract

*The eruption of Krakatau on August 26 to 27, 1883 was one of the largest and strongest volcanic eruption in the 19th century after Tambora Mountain in 1815. The eruption of Krakatau in 1883 led to a large number of casualties and severe damage to both the environment and the people and government infrastructure as a result of the eruption of volcanic material and the tsunami waves. The information of the eruption and its effects spread all over the world and generated both attention and donations for the victims. In undulating relief from the archipelago and the international community poured into the disaster relief fund administered by the Dutch colonial government. However, how was the implementation of the post-disaster relief assistance administered by the Dutch government, especially concerning the local residents who were the biggest victims in the eruption of Krakatau? How effective was the management of the disaster relief funds organized by the Dutch government? Through the study of literature with the resources from the Krakatau's disaster assistance report written by the Dutch and famous verses of the local population as references, this paper would like to see the effectiveness of the Dutch colonial political disaster, especially in the event of Krakatau's eruption in Banten and Lampung.*

**Key Words :** Volcano, Krakatau, Dutch Colonial, Ethnic, Local Residents, Europe, China, Post-Disaster Relief And Recovery

Belanda Willem Beijerinck ini menggambarkan bagaimana Beijerinck dan istrinya berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya setelah hembusan tsunami membunuh banyak penduduk di koloninya. Secara umum, film ini banyak menggambarkan perjuangan keluarga Belanda tersebut serta orang asing lainnya yang terperangkap dalam sebuah kapal laut *Loudon* (kapal penumpang yang sedang singgah dan kemudian berlayar dari

Anyer Banten menuju Teluk Lampung untuk mendekati Pulau Rakata). Alhasil, film ini sedikit sekali menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat lokal/asli (pesisir Banten dan Lampung) yang mengalami dampak terbesar tsunami akibat letusan gunung Krakatau.

Buku karya Simon Winchester, *Krakatoa, the Day the World Exploded, August 27, 1883* melukiskan mengenai Gunung Krakatau, letusan Krakatau 1883, dan perjuangan para penumpang di Kapal *Loudon* pada saat dan setelah diterjang gelombang tsunami. Sama seperti film “*Krakatoa, the Last Day*”, buku ini pun lebih melihat dari perspektif non-lokal, yaitu lebih banyak menguraikan perjuangan orang asing dalam peristiwa dan pascaletusan Krakatau dibandingkan kondisi penduduk asli yang mendiami Banten dan Lampung.

Gunung Krakatau pada abad ke-19 meletus pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883. Letusan Krakatau ini memberikan dampak yang luar biasa, baik bagi lingkungan maupun kehidupan mahluk di sekitarnya. Sudah banyak tulisan yang dibuat yang menggambarkan dan menganalisis letusan Krakatau 1883. Tulisan-tulisan tersebut terutama memaparkan mengenai kekuatan letusan dan efeknya bagi bumi, seperti mengenai suara letusan, ketinggian jangkauan material ke langit bumi, debu dan batu yang dihamburkan, perubahan iklim, hingga gelombang tsunami yang memberikan banyak pemahaman baru mengenai kedahsyatan letusan gunung berapi yang berdiri di atas laut. Hasil letusan Krakatau 1883 juga memberikan pengetahuan muktahir terutama dalam bidang geologi, biologi, meteorologi dan oseanografi.

Literatur yang menjelaskan, menganalisis dan menggambarkan letusan Gunung Krakatau dan dampaknya yang besar bagi alam dan kehidupan manusia didominasi oleh tulisan bersifat sains dibandingkan analisis sosial. Bryant (2005), misalnya, menggambarkan letusan Krakatau 1883 sebagai bahaya geologi dan merupakan letusan vulkanik yang terkenal di dunia. Dalam artikel Carey, Sigurdsson, Mandeville, dan Bronto (2000), penulis menganalisis dampak letusan Krakatau 1883 terhadap bahaya gelombang piroklastik (*pyroclastic*) yang menyebabkan letusan Krakatau ini bersifat unik dan berbahaya bagi pantai-pantai di sekitar gunung berapi ini serta pada jarak-jarak yang jauh. Selanjutnya, Decker (1991) melihat letusan Krakatau 1883 sebagai bencana alam legendaris. Penulis menggambarkan dampak letusan Krakatau yang besar dan luas, terutama dalam hal gelombang tsunami dan perubahan iklim. Buku-buku yang menjelaskan situasi mengenai letusan Krakatau juga digambarkan oleh

Furneaux (1964) dan Hakim (1981). Penulis menjelaskan letusan Krakatau dan situasi setelah letusan. Seperti Abdul Hakim yang menjelaskan situasi setelah letusan di wilayah Jawa Barat, Anyer, Merak, Banten, dan Teluk Betung, Sumatra. Selanjutnya, Simkin dan Fiske (1983) menggambarkan letusan dan dampak dari letusan Krakatau melalui gambaran saksi mata dan analisis monograf dari R.D.M. Verbeek (geologis terkenal berkebangsaan Belanda yang dikirim pemerintah Belanda untuk meneliti semua yang berkaitan dengan Gunung Krakatau, letusan dan dampaknya) tahun 1885. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah Wimchester (2003) yang memberikan narasi kronologis letusan Krakatau berdasarkan saksi mata di Kapal *Loudon*; perusahaan *Lloyd*, monograf Verbeek serta sumber asing lainnya.

Namun demikian, ada sebagian literatur yang melihat letusan Krakatau dari perspektif sosial dan politik. Tulisan Lopian (1987), misalnya, menjelaskan mengenai hubungan letusan Krakatau 1883 dengan kepercayaan lokal, di mana penulis melihat bahwa bencana Krakatau terjadi karena kondisi sosial atau politik dan ekonomi masyarakat lokal yang buruk. Bencana Krakatau pada saat itu dianggap sebagai hukuman Tuhan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang bertindak sewenang-wenang pada masyarakat Aceh yang taat beragama. Di samping itu, bencana Krakatau juga menarik respons sosial pemerintah di negeri Belanda untuk memberikan bantuan kepada penduduk di koloninya. Dalam bukunya, Kartodirdjo (1984) menjelaskan ide pergerakan petani di Banten yang juga disebabkan oleh kondisi pascaletusan Krakatau yang memperburuk kondisi masyarakat Banten yang telah miskin. Kondisi kelaparan dan penyakit setelah letusan Krakatau semakin memperkuat sikap keagamaan dan perlawanan masyarakat untuk menentang kesewenangan penjajah kolonial. Dan terakhir, Abdurachman (1983) penulis melihat efek letusan Krakatau pada psikologis korban bencana berupa trauma.

Gelombang tsunami besar yang terjadi akibat runtuhan sebagian badan Gunung Krakatau beserta Pulau Rakata beserta dua gunung lainnya (Gunung Perbuatan dan Danan) telah mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak dan kerusakan ekologi yang besar di wilayah Selat Sunda, khususnya pada wilayah Banten dan Lampung. Daerah-daerah yang mengalami kerusakan di sekitar Banten dan Lampung termasuk bagian barat Banten (dari Merak hingga Tanjung Layar and Pulau Panaitan), pantai selatan Sumatra (sekitar Tanjung Rata, Teluk Semangka,

Teluk Lampung, dan Tanjung Tua), dan banyak pulau di Selat Sunda (Hakim, 1981:8).

Jumlah penduduk yang tewas akibat dampak letusan Gunung Krakatau 1883 sekitar 36.000 orang dan ada 24.314 orang hidup terombang-ambing tanpa arah. Sumber pendapatan penduduk hilang, di mana hewan ternak mati, lahan pertanian musnah tertimbun lumpur dan perkebunan rakyat seperti kelapa, kopi dan karet hancur. Kemudian, bagaimanakah bantuan pertolongan pascabencana yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, terutama untuk penduduk lokal yang menjadi korban terbesar dalam peristiwa letusan Krakatau ini? Apakah pengelolaan dana bantuan untuk korban bencana yang dilakukan oleh pemerintah Belanda berjalan efektif? Hal ini penting untuk dilihat mengingat pada saat itu banyak sekali bantuan berupa dana keuangan yang masuk ke dompet pertolongan bencana Krakatau yang di kelola oleh pemerintah kolonial Belanda.

Tulisan ini merupakan tulisan bersifat deskriptif dan analisis dengan studi literatur yang menggunakan bahan-bahan pustaka seperti laporan Belanda untuk bencana Krakatau dan sumber lokal berupa sajak *Inilah Syair Lampung Karam Adanya* yang ditulis oleh penduduk lokal (Muhammad Saleh) yang menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Karakatau 1883. Tulisan ini secara umum ingin melihat bagaimana politik bencana pemerintah kolonial Belanda atau bagaimana pemerintah Belanda melakukan pertolongan dan pemulihan pascabencana, khususnya untuk penduduk lokal di *Netherlands Indie*.

## BENCANA KRAKATAU 1883: MORTALITAS DAN ALIRAN DANA BANTUAN

Aktivitas Gunung Krakatau mengeluarkan asap dan debu dengan gempa-gempa kecilnya sudah berlangsung sejak bulan Mei 1883. Namun, hal ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat dan penguasa bahwa Krakatau sedang bergeliat sebelum meletus. Begitu pula pada bulan Agustus, masyarakat tetap tidak menyadari hingga letusan besar terjadi dengan disertai gelombang tsunami. Klimaks meletusnya Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 yang disertai dengan gelombang tsunami memberikan dampak besar, sehingga banyak penduduk yang kehilangan sanak saudara, mengalami kelaparan, luka berat, terjangkit penyakit dan berkelana atau mengungsi untuk mencari perlindungan dan bantuan. Letusan besar Gunung Krakatau juga menghasilkan debu vulkanik yang menutupi atmosfer dan menghalangi sinar matahari menyentuh bumi. Batu, lumpur dan debu telah merusak tanah, pepohonan dan

sungai. Dampak terbesar berupa gelombang besar tsunami telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan penduduk lokal dari pemukiman hingga mata pencaharian penduduk. Tsunami telah meratakan dan menghapus banyak kampung atau desa-desa yang didiami oleh ribuan manusia, hewan dan tumbuhan yang dihanyutkan dan musnah tersapu tsunami. Penduduk yang selamat pun dihantui oleh rasa cemas, kelaparan dan ketakutan akibat penjarahan dan pencurian oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan (Furneaux, 1964:166).

Bagi Belanda, bencana Krakatau telah menyebabkan kerugian besar. Banyak infrastruktur yang hancur dihantam kerasnya gelombang tsunami. Rusaknya usaha perkebunan dan pertanian yang dimiliki Belanda dan orang asing lainnya juga menjadi beban ekonomi tersendiri bagi pemerintah Belanda yang saat itu menjalani politik Liberal, di mana banyak pengusaha asing atau investor yang menjalankan bisnis perkebunan di Sumatra.

Wilayah penting yang terserang tsunami di Banten seperti Anyer, Carita dan Caringin mengalami rusak berat. Banyak infrastruktur yang hancur seperti perumahan atau rumah penduduk, gedung pemerintahan, pasar, pergudangan, mercusuar, fasilitas telegraf, jalan-jalan raya, jembatan, bendungan, persawahan dan pertenakan (Abdurachman, 1983: 2). Debu vulkanik dan batuan apung juga telah menciptakan daerah-daerah pantai dan utara Banten menjadi wilayah yang tandus. Bangkai-bangkai hewan membosuk dan menyebarkan bau tidak sedap. Sehingga, pergerakan gelombang tsunami yang besar bersama dengan material vulkanik berupa batu dan magma serta material dari laut dan daratan yang dibawanya disinyalir menjadi sebab begitu banyaknya korban jiwa dan kerusakan. Tsunami yang menerjang pantai di Caringin dengan juga membawa bongkahan karang sejauh lima hingga tujuh mil menyebabkan ribuan penduduk tewas (Furneaux, 1964:98). Gelombang tsunami yang menerpa wilayah Panimbang telah menenggelamkan daerah tersebut. Begitu pula tsunami yang melanda wilayah Cirebon. Banyak penduduk yang berusaha melarikan diri akhirnya ikut tewas akibat terjebak oleh serangan tsunami yang mendadak. Di desa Tanara ditemukan 700 tubuh penduduk yang tewas serta di Tangerang sekitar 1.974 orang penduduk lokal dan 46 orang Asia tewas. Untuk wilayah Merak, daerah yang padat penduduknya, ditemukan 3.000 penduduk yang tewas dan semua ini belum termasuk penduduk yang hilang terbawa arus balik ke laut (Ibid., 110). Banyak kota-kota di wilayah Banten yang hilang tersapu tsunami. Di sekitar Lampung, khususnya di Pulau Sebesi dan Sebuku, ribuan orang

tewas tersapu tsunami. Tidak ada lagi penduduk yang hidup dan pulau-pulau tersebut menjadi rata, terhapus oleh gelombang tsunami. Seperti yang terekam dalam syair berikut ini:

*Pulau Sebuku dikata orang,  
Ada seribu lebih dan kurang,  
Orangnya habis nyatalah terang,  
Tiadalah hidup barang seorang.<sup>1</sup>*

Wilayah Teluk Betung merupakan salah satu wilayah yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Jarak pantai dan Gunung Krakatau yang cukup dekat mengakibatkan kecepatan dan besarnya tsunami memberikan dampak yang sangat signifikan bagi wilayah ini. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, tsunami meluluhlantakkan seluruh wilayah tersebut serta menewaskan 2.260 penduduk lokal dan tiga orang Eropa (Furneaux, 1964:109). Situasi Teluk Betung yang digambarkan oleh Kapten kapal *Loudon*, Lindemann, ketika kapal ini merapat di Teluk Semangka adalah banyak sekali desa-desa dan kampung-kampung yang rusak parah. Di Desa Beneawany, sekitar 2.500 penduduk tewas, sedangkan di daerah Tandjoeng dan Tanot Bringin terdapat 227 orang yang meninggal, serta di daerah Betoeng ada 244 orang yang menjadi korban tsunami. Suasana Teluk Betung saat itu benar-benar senyap dan rata tidak tersisa (*Ibid.*, 112). Sedangkan, di Tanjung Karang, penduduk yang selamat mengalami kelaparan, keputusasaan, dan menjadi tuna wisma (Suryadi, 2008).

Tabel 1. Jumlah penduduk yang tewas dan desa yang rusak akibat letusan Krakatau 1883

Wilayah	Penduduk Eropa	Penduduk Asli	Jumlah Desa yang Rusak Berat	Jumlah Desa yang Rusak Sebagian
Sumatra - Bengkulu	-	34	2	-
Lampung				
- Kota Teluk	3	714	9	1
- Wilayah Teluk Betung	-	1.546	24	4
- Sekampung	1	5	-	-
- Kalimbang	1	8.037	46	-
- Teluk Semangka	1	2.159	23	31
Jawa				
- Banten				
- Serang	-	1.933	3	30
- Anyer	14	7.583	10	25
- Merak	13		-	-
- Caringin	5	12.017	38	12
- Batavia	-	2.350	10	26
- Karawang	-	2	-	3
Total	37	36.380	165	132

Sumber: Rupert Furneaux, *Krakatoa*, Prentice-Hall Inc., 1964. hal. 132

<sup>1</sup> Suryadi, *Syair Lampung Karam, Image of the 1883 Eruption of the Krakatau Mountain in a Classical Malay Literary Text*, 2008, hal. 19

Total jumlah penduduk yang tewas akibat bencana letusan Krakatau 1883 ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa berdasarkan laporan penguasa saat itu, diperkirakan terdapat 36.417 penduduk tewas, sebagian besar (90 persen) akibat terpaan tsunami, serta terdapat 165 desa yang rusak parah. Sedangkan menurut van Sandick (saksi mata/penumpang pada kapal *Loudon*) yang bertemu dengan Residen Banten, Heer van Spaan, diperkirakan jumlah keseluruhan dari penduduk yang tewas di Jawa dan Sumatra akibat letusan Krakatau sekitar 40 ribu orang (Furneaux, 1964:127).

Pejabat saat itu mencatat bahwa sebagian besar korban bencana Krakatau adalah penduduk lokal (Tabel 1). Verbeek sendiri menganalisis bahwa jumlah korban dari penduduk Eropa dengan tepat dapat diketahui, sedangkan korban dari penduduk lokal sulit diperkirakan, terutama jumlah penduduk yang terbawa arus kembali ke laut. Sehingga, perkiraan jumlah korban yang tewas masih merupakan jumlah korban yang dapat ditemukan atau didata berdasarkan informasi kekerabatan atau data kependudukan desa yang ada saat itu. Sedangkan bagi penduduk lokal yang selamat, mereka mengalami ancaman kelaparan, kekurangan air bersih, penyakit terutama dari bangkai-bangkai hewan dan manusia, kemiskinan dan masalah psikologis karena kehilangan sanak saudara dan ketakutan. Korban dari penduduk asing, seperti Belanda dan orang Eropa lainnya, mencari pertolongan ke wilayah lain yaitu wilayah residen-residen atau pejabat Belanda dan lokal yang selamat tempat tinggalnya. Mereka berlindung di sana hingga pertolongan dari pemerintah pusat datang. Sementara itu, penduduk Cina kaya pergi mencari tempat berlindung dan berteduh pada keluarga atau sanak saudaranya di wilayah lain yang selamat atau tidak tertimpak bencana.

Beberapa hari setelah bencana letusan Krakatau, perhatian nasional dan internasional mengarah ke wilayah bencana. Selain efek luas letusan Krakatau yang berupa debu, ombak tsunami dan perubahan iklim, berita bencana juga tersebar luas ke penjuru Eropa dan Asia berkat teknologi telegraf yang baru berkembang saat itu. Telegraf memberitakan bencana Krakatau ke penjuru dunia dengan cepat, sehingga informasi bencana ini menjadi pokok berita di koran-koran nasional dan asing.

Dengan telegraf, lima hari setelah letusan Krakatau, Alexander Cameron (Dewan Inggris di Batavia) mengirim berita mengenai kedahsyatan letusan Gunung Krakatau kepada William Gladstone (Menteri Inggris). Beliau menggambarkan tentang suara dan

letusan yang dahsyat, abu tebal yang menutupi langit dan situasi di sekitar Jawa dan Sumatra. Beliau juga menguraikan bagaimana kehidupan wilayah-wilayah di Selat Sunda dalam sekejap hilang karena penduduknya yang tewas, perkebunan dan pertanian yang musnah dan hewan ternak yang mati (Winchester, 2003: 136-9). Sementara itu, penduduk yang selamat juga berada dalam ancaman kematian karena kelaparan.

Banyaknya penduduk yang menjadi korban telah menarik gelombang bantuan berupa dukungan finansial yang mengalir ke kas bantuan bencana Krakatau yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Berdasarkan laporan pertama dari tim bantuan Bencana Krakatau yang dibentuk Belanda, terdapat sekitar f 1,159,867.18 (atau pada saat itu kurang lebih sekitar US\$ 386,622.39 jika 1 dollar Amerika sama dengan 3 gulden Belanda) yang mengalir ke *Netherlands Indies*. Dana bantuan tersebut datang dari daerah-daerah di Indonesia, seperti dari masyarakat di Pulau Jawa<sup>2</sup>, dengan total f 380,575.37, serta dari berbagai wilayah lain di Nusantara, seperti dari wilayah Sumatra (Timur dan Barat), Aceh, Riau, Bangka, Belitung, Borneo Barat, Borneo Selatan dan Timur, Manado, Celebes/Sulawesi dan sekitarnya, Ambon, Ternate, Timor, Bali dan Lombok (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*, 1884:6).

**Tabel 2. Jumlah bantuan finasial korban bencana Krakatau**

Sumber	Jumlah dana (dalam f)
<i>Nederlands Indie</i>	496,241.30
(Indonesia) <i>Netherlands</i>	494,300.00
Asing	169,325.88
<b>Total Dana</b>	<b>1,159,867.18</b>

Sumber: Laporan pertama dari tim bantuan Bencana Krakatau yang dibentuk Belanda

Bantuan asing datang dari negeri Belanda, Singapura, Penang (Malaysia), Siam (Thailand), Inggris, Persia, Suriname, dan sebagainya. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, 1884*).

<sup>2</sup> Batavia, Karawang, Preanger/Priangan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Madura, Pasuruan, Probolinggo, Basuki, Banyumas, Bagelen, Kedu, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Surakarta.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, sebagian besar dana bantuan datang dari Nusantara. Dana-dana ini banyak pula yang datang dari pengusaha-pengusaha Cina. Selain dalam bentuk finansial, penduduk Cina juga memberikan bantuan dalam bentuk logistik, seperti:

1. *Kapiten The Tjing Siang* dari Buleleng memberikan 100 *kojang*<sup>3</sup> beras yang di bawa dari Ampenan (Lombok) ke Karang Antoe, pelabuhan laut Serang.
2. Kwak Tek Ki dari Palembang memberikan 300 *pikol*<sup>4</sup> beras.
3. Tjoen A. Tiam, *Kapiten* Titulair dari Muntok memberikan 100 *pikol* beras.
4. Wee Bin & Co asal Singapura memberikan 500 kantung beras.

Dalam laporan kedua (1884), kantung bantuan bencana memperoleh f 1,220,962.98 di mana f 133,582.52 (sekitar 10 persen) berasal dari luar negeri (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Tweede Stuk*, 1884: 8-9), yang berarti 90 persen bantuan datang dari masyarakat nusantara. Bantuan-bantuan korban bencana Krakatau yang datang dari negeri Belanda bersumber dari keluarga kerajaan dan 860 kota-kota di Belanda (semuanya terkumpul kurang lebih f 395,587.94) serta dari berbagai kegiatan-kegiatan amal. Kerelaan masyarakat Belanda yang antusias mengumpulkan dana tidak terlepas dari peranan *Netherlands Indies* sendiri, termasuk Banten dan Lampung. Dalam periode sistem tanam paksa, Belanda telah mengambil begitu banyak keuntungan dari hasil tanam paksa dan pajak pribumi, seperti Belanda mampu membayar hutang-hutang lama, melaksanakan pembangunan infrastruktur (jalan raya

<sup>3</sup> Jika satu *kojang* adalah sekitar 1,976 pounds, maka 100 *kojang* sama dengan 197,600 pounds atau 98.800 kilogram. *Kojang* adalah ukuran pada perdagangan VOC (*Verenigde Oost-indische Compagnie*, perusahaan dagang Belanda) untuk menghitung biaya pengiriman. Encyclo, Online Encyclopedie, <http://www encyclo nl/begrip/ Pikol>, diakses 21 Mei 2009.

<sup>4</sup> Jika satu *pikol* atau *pikul* adalah sekitar 75 kilogram, maka 300 *pikol* sama dengan 22.500 kilogram. *Pikol* atau *pikul* adalah satuan-satuan ukuran pada masa kerajaan (Unit Measurement in the Kingdom Period), 6 Maret 2009, <http://www wacananusantara org/15/199/satuan-satuan-ukuran-pada-masa-kerajaan p/2?PHPSESSID=8bca97e79799356e95cffdd330178f6e>. Dalam sumber lain, disebutkan bahwa 1 *pikol* sama dengan 61.76 pounds dalam ukuran berat perdagangan VOC untuk barang perdagangan. Maka 300 *pikol* x 61.76 pounds = 18,528 pounds = 9.264 kilogram (Encyclo, Online Encyclopedie, <http://www encyclo nl/begrip/ Pikol>, diakses 21 Mei 2009)

dan kereta api), serta menstabilkan perekonomian Belanda saat itu. Di lain pihak, kondisi di negeri koloninya mengalami hal yang sebaliknya. Terutama di Lebak, Banten di mana kondisi daerah ini pada periode tanam paksa dipaparkan oleh Multatulli (Eduard Douwes Dekker) dalam bukunya *Max Havelaar* mengalami kemiskinan, kelaparan serta penderitaan berat akibat tekanan pejabat Hindia Belanda dan kondisi ini mengundang banyak kritik dari negeri Belanda.

Namun, banyaknya bantuan keuangan yang mengalir ke kantung bantuan bencana Krakatau yang di kelola oleh Belanda ini bukan berarti sebagian besar digunakan untuk kepentingan korban dari penduduk lokal yang begitu banyak jumlahnya. Banyaknya korban penduduk lokal membuat penguasa saat itu mengambil langkah-langkah generalisasi dengan jenis-jenis bantuan kolektif, untuk bersama-sama. Bantuan ini dalam bentuk, misalnya, membangun tempat tinggal untuk bersama-sama (sementara) dan memberikan bantuan pangan yang dikonsumsi secara bersama-sama.

## PERTOLONGAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA: EROPA, CINA DAN PRIBUMI

Secara umum, jumlah korban dari penduduk Eropa sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk lokal. Sebagian besar penduduk asing adalah pengusaha, seperti pengusaha perkebunan, pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di antara mereka juga menjadi pejabat pemerintahan lokal. Karena posisi sosial, ekonomi dan politik yang berbeda, bantuan yang diberikan pada penduduk Eropa sangat berbeda dengan penduduk lokal. Penduduk Eropa ini diberikan bantuan berupa tempat tinggal yang lebih baik, misalnya dengan berbahan batu. Sedangkan bantuan finansial yang diterima mereka juga berbeda skalanya. Para pejabat Eropa diberikan bantuan keuangan yang bersifat *monthly*, atau per bulan dengan jangka waktu yang kurang lebih ditentukan. Besarannya berkisar gaji per bulan mereka. Begitu pula dengan pegawai negeri dalam artian pejabat lokal. Bahkan ada pejabat lokal dan Eropa mendapat kompensasi sebesar gaji per bulan dalam jangka waktu satu tahun. Begitu pula dengan para janda-janda dari para pejabat Eropa dan lokal. Mereka mendapat bantuan dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan setiap bulan. Para janda dan keturunannya mendapat kompensasi sebesar f 33,997.50 (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*, 1884:13-14). Dalam hal ini, anggota keluarga dari penduduk asing, baik yang hidup maupun yang telah tewas dalam bencana, diberikan

kompensasi dengan besaran yang ditentukan oleh pejabat bantuan bencana. Tidak begitu banyaknya korban dari orang Eropa justru menjadikan mereka prioritas pertama dalam penerimaan bantuan. Sehingga, jika dalam per bulan pemerintah harus mengeluarkan bantuan sebesar f 120,000 (*Ibid.*, 10) khusus untuk orang Eropa, maka berapa banyak pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu satu tahun. Bahkan di Anyer, mereka mengeluarkan f 25,000 untuk kompensasi pejabat sipil, meskipun mereka tidak menderita dan mengalami kehilangan yang berarti.

Penduduk Cina di Banten, terutama yang menduduki posisi sebagai pedagang atau pengusaha (perkebunan), juga mendapatkan kompensasi. Namun, tidak ada perhitungan yang pasti mengenai besaran kompensasi untuk properti dan perkebunan yang rusak. Secara umum, penduduk Cina dan keluarganya yang tewas dalam bencana diberikan kompensasi juga. Berkaitan dengan kerugian harta benda, pemerintah Belanda secara hitungan kasar mengganti sebanyak 20 persen dari jumlah kerugian sebesar f 2,000 dan 5 persen untuk kerugian lebih dari f 20,000 (*Ibid.*, 14). Untuk penduduk Cina di Teluk Betung Sumatra, pemerintah Belanda memberikan kompensasi f 35,000 dan akan membangun tempat tinggal mereka kembali. Untuk yang berprofesi pedagang, mereka juga mendapatkan bantuan modal usaha. Dengan demikian, bantuan yang tercatat untuk penduduk Eropa dan Cina, sebagian besar diutamakan dalam bentuk bantuan finansial. Hal ini dianggap penting untuk membangkitkan kemampuan ekonomi mereka. Sedangkan untuk pertolongan utama yang diberikan penguasa bagi korban penduduk lokal yang banyak jumlahnya diantaranya adalah dengan memberikan bantuan makanan. Contoh bantuan makanan diberikan pemerintah Belanda yang disampaikan oleh saksi mata adalah:

*Di Tanjung Karang pertama kali,  
Dapatlah ransum setengah kati,  
Beras ketan dicampuri,  
Supaya perut boleh terisi.*<sup>5</sup>

Bantuan pertama yang diterima oleh penduduk lokal adalah beras, meskipun ada yang dicampuri dengan ketan. Nasi ketan dianumsikan cukup dikonsumsi menggunakan garam meskipun tanpa makanan/lauk tambahan dan diperkirakan cukup sesuai untuk situasi darurat dan diterima masyarakat untuk mengatasi kelaparan. Mudah, banyak tersedia/disuplai (bantuan),

<sup>5</sup> Suryadi, *Syair Lampung Karam, Image of the 1883 Eruption of the Krakatau Mountain in a Classical Malay Literary Text*. P. 18 (141)

makanan umum penduduk tropis dan murah juga dapat menjadi alasan bagi komite pertolongan untuk menyediakan jenis makanan ini. Selain beras, makanan yang tersedia di alam atau lingkungan, seperti buah pisang dan kelapa, juga diutamakan agar penduduk terhindar dari kelaparan (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*, 1884:9). Namun, pertolongan makanan ini pun tidak dengan cepat dan luas dijangkau korban bencana. Di Tanjung Karang, Sumatra, banyak penduduk lokal harus mencari bantuan makanan. Kebanyakan mereka adalah pengungsi dalam keadaan kelaparan.

*Orang banyak tiada terbilang,  
Duduk berkumpul silang menyilang,  
Bugis, Jawa, Cina, Palembang,  
Seperti rupa tewas berperang.*<sup>6</sup>

Dalam penerimaan bantuan makanan, sebagian penduduk berkumpul dan duduk dengan tertib untuk memperoleh jatah makanan. Dengan sedikit bantuan beras atau ketan, mereka berusaha memasaknya dengan perlengkapan masak yang telah rusak (meskipun pada bulan-bulan selanjutnya ada sedikit bantuan perlengkapan memasak dan makan minum). Mereka tidur di mana saja mereka mampu karena belum ada bantuan tempat berteduh. Penduduk pun kekurangan air bersih. Hanya air asin dan berlumpur yang tersedia dan harus berebut satu sama lain untuk memperolehnya. Berhari-hari bahkan berbulan kondisi ini terjadi (Suryadi, 2008:153-4).

Bantuan makanan merupakan salah satu pertolongan utama dan dalam jangka pendek harus dipenuhi untuk para korban bencana. Dalam peristiwa bencana Krakatau 1883, permasalahan bantuan makanan bagi penduduk lokal yang selamat sangat kompleks. Pada hari kedua puluh, penduduk baru mendapat satu atau setengah gelas ketan per orang. Itupun diperoleh dengan cara berebut, bahkan banyak di antara mereka yang telah menunggu hingga petang, namun tidak mendapatkan apa-apa (*Ibid.*, 155-8). Pada hari-hari selanjutnya, kebutuhan akan pangan semakin tinggi. Pada satu kesempatan, penduduk bisa mendapatkan dua gelas ketan, namun untuk tiga orang, sehingga kondisi ini belum bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk satu hari. Penyaluran makanan yang lambat mendorong penduduk lokal yang masih memiliki harta yang tersisa menggunakannya untuk membeli bahan pangan yang dijual oleh kepala desa dan residen di wilayah mereka. Di Tanjung Karang, residen menjual beras kepada penduduknya seharga

sepuluh sen per *kati*<sup>7</sup> (sepuluh sen untuk 308,8 gram beras). Namun, tidak diketahui secara pasti apakah beras ini merupakan beras bantuan bencana atau milik pribadi.

Untuk membangun kembali ekonomi desa, pemerintah memberikan dana bantuan untuk membangun warung. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa pembelian alat menangkap ikan, menjahit, hewan ternak, seperti kerbau untuk membajak sawah, serta bibit pertanian. Namun, masyarakat berkewajiban untuk memperbaiki lahan pertanian ini sendiri (meskipun memakan waktu lama) dengan fasilitas yang telah diberikan. Para korban bencana yang selamat, khususnya wanita dan anak-anak, sangat membutuhkan makanan, tempat tinggal dan pakaian. Penduduk lokal diberikan bantuan berupa kebutuhan pangan seperti beras dan garam. Tempat tinggal yang dibangun untuk sementara bersifat kolektif berupa “*rumah bitjara*” (*balai, sesat*). Untuk pembangunan gedung desa (*sesat*), pemerintah Belanda mensuplai bahan dasar berupa kayu dan bambu serta upah pekerja. Pemerintah membangun sekitar 60 gedung kota (*sesat*) di 60 wilayah dengan biaya f 15,000 (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*. 1884:24). Sedangkan untuk pembangunan rumah individu, pemerintah mensuplai atap jerami, namun mengharapkan penduduk dapat membangun kediannya sendiri dengan mencari dan menggunakan kayu-kayu atau batang dan daun kelapa. Pemerintah Belanda saat itu mengeluarkan sekitar f 30,000 untuk membangun 1.200 rumah atau sekitar f 25 per rumah (dahulu sekitar US\$8, atau sekarang Rp. 80.000).

Di samping itu, pemerintah Belanda juga berusaha menyediakan kebutuhan masyarakat berupa sarung, celana, selimut, gambir atau rokok, sabun, alat menjahit, serta perlengkapan memasak dan makan minum. Pemerintah juga menyalurkan bensin untuk membakar bangkai-bangkai hewan ternak. Meskipun demikian, masih banyak sekali penduduk lokal yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah Belanda. Selain itu, pemerintah Belanda juga melupakan kebutuhan lain berupa penyediaan air bersih, obat-obatan dan kebutuhan mandi cuci kakus bagi penduduk lokal. Selain bersifat kolektif, tidak semua penduduk terdata atau sempat mendata dirinya kepada pemerintah sebagai korban bencana. Penduduk banyak yang tidak mengerti dan mengetahui informasi pertolongan bencana. Mereka hanya bergantung kepada kepala desa dan residen yang mereka ketahui yang juga sibuk dengan kondisi diri dan keluarganya.

<sup>6</sup> *Ibid.*, P. 19 (142).

<sup>7</sup> 1 *kati* = 61.76 x 500 gram/100 = 308,8 gram

Banyak korban yang terlewatkan oleh pemerintah pusat, sehingga banyak dari korban yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa, kecuali bantuan dari penduduk setempat atau sesama korban yang iba. Di samping itu, dana bantuan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pejabat lokal juga rentan dikorupsi serta tidak tersalurkan dengan tepat. Dengan demikian, masyarakat korban bencana yang cukup banyak berpeluang untuk tidak mendapat bantuan secara merata.

Pertolongan pascabencana juga ditujukan kepada para pengungsi. Satu minggu setelah letusan Krakatau, banyak penduduk yang eksodus dari wilayah Lampung menuju Batavia. Mereka berjalan dari daerahnya berhari-hari hingga menuju pelabuhan di Minanga (Suryadi, 2008:27) untuk menunggu kapal-kapal laut yang akan berangkat ke Betawi atau Batavia. Para pengungsi ini menumpang kapal-kapal laut tanpa uang sewa, sehingga mereka diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan di atas kapal dan harus menuruti semua perintah yang diberikan oleh nakhoda dan awak kapal tersebut. Jika tidak menuruti perintah mereka, maka para pengungsi akan mendapat caci dan kekerasan fisik. Sesampainya kapal-kapal laut ini di Tanjung Periuk, para pengungsi menumpang kereta api yang menuju Batavia. Di Batavia, para pengungsi ini mempunyai persoalan tempat tinggal dan kebutuhan pangan. Banyak pengungsi yang menjadi pengemis untuk mendapatkan rupiah atau belas kasih orang untuk mendapatkan makanan. Hingga pada suatu kesempatan, mereka berkumpul dengan korban-korban bencana Krakatau lainnya yang berasal dari wilayah Banten. Di sana, mereka didata oleh residen yang berwenang.

Secara umum, eksodus penduduk yang besar ini memberikan dampak tersendiri bagi kota Batavia, terutama persoalan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha membangun kembali pemukiman di wilayah-wilayah Banten, Bengkulu, Palembang, dan Bawean. Dalam laporan pertamanya (*Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*, 1884), Komite Pusat menyebutkan salah satu upaya pemerintah kepada pengungsi adalah mengembalikan mereka kembali ke daerah asal. Dari pendataan para pengungsi, mereka diberikan dana sekitar sepuluh rupiah saat itu untuk pulang ke wilayahnya kembali. Namun begitu, banyak para pengungsi ini yang enggan kembali ke Lampung atau daerah lainnya karena jaminan hidup yang tidak ada lagi, seperti tidak memiliki lahan pertanian, pemukiman, dan hewan ternak. Sehingga banyak dari mereka tetap

berada di Batavia menjadi pekerja kasar, bergelandang atau menumpang hidup di rumah-rumah penduduk yang simpati kepada mereka.

Dari pemaparan di atas, secara garis besar pemberian bantuan pemerintah kolonial kepada penduduk asing lebih banyak bersifat bantuan finansial meskipun mereka juga mendapatkan bantuan bahan makanan dan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Sebaliknya, banyak masyarakat lokal yang disuplai dengan kebutuhan pokok seperti beras, singkong, ketan, dan garam, pada saat penduduk asing bisa mendapatkan daging kering, telur, mentega, dan sarden. Jumlah korban dari masyarakat lokal yang banyak tentunya memerlukan dana yang besar pula, sedangkan korban penduduk asing yang sedikit diseimbangkan dengan kompensasi atau ganti rugi dan salary dengan jumlah yang besar. Di samping itu, bantuan finansial yang besar kepada penduduk asing, penduduk kelas menengah atau pengusaha Cina diharapkan, selain dapat melakukan aktivitas ekonomi kembali, agar mereka mampu pergi atau membeli keperluannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya. Penduduk lokal terutama disuplai bantuan pangan untuk menghindari kelaparan dan kematian, karena mereka akan tinggal lebih lama atau selamanya di daerah bencana; sedangkan penduduk asing dapat dipindahkan oleh pemerintah ke tempat yang aman atau kembali ke negeri asalnya.

Stratifikasi pemberian bantuan pascabencana di Lampung juga terlihat antara pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang (sebagian besar berketurunan Cina) dan penduduk lokal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pejabat lokal diberikan kompensasi dan bantuan pembangunan tempat tinggal. Pemerintah Belanda juga menyiapkan dana untuk para kepala desa atau suku, dengan memberikan bantuan keuangan dan ganti rugi atas harta milik yang hilang, dan untuk para pedagang Cina, mereka diberikan modal perdagangan serta kompensasi untuk kerugian harta.

## PEMULIHAN PASCABENCANA: KEBUTUHAN PEMERINTAH KOLONIAL

Setelah bencana, pemerintah kolonial Belanda segera mengambil langkah-langkah pemulihan pascabencana. Secara pribadi, Belanda sangat berkepentingan untuk melakukan pemulihan di wilayah-wilayah bencana, seperti Banten dan Lampung. Kedua wilayah di Selat Sunda ini merupakan wilayah yang penting secara politik dan ekonomi bagi pemerintah kolonial. Selat Sunda merupakan jalur perdagangan yang penting dan ramai serta terdapat basis-basis pertanian dan perkebunan.

Oleh karena itu, pemulihan yang utama adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi ekonomi dan politik kolonial.

Pemerintah Belanda berusaha menggunakan kendaraan berat untuk dapat menerobos daerah-daerah terpencil yang ditempati penduduk asing dan memiliki potensi perkebunan penting. Mereka membawa serta bantuan untuk para korban bencana, baik penduduk asing maupun lokal, berupa beras, garam, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Usaha membersihkan lumpur dari daerah perkebunan dan memperbaiki jalan-jalan utama, gedung pemerintahan, fasilitas komunikasi/telegraf, rel-rel kereta api dan pelabuhan juga menjadi prioritas bagi pemerintah Belanda agar kegiatan ekonomi dapat berjalan kembali.

Pertolongan pada korban, terutama pada penduduk lokal, juga penting, untuk meredam gejolak sosial. Selain itu, kelaparan, penyakit, dan kejahatan juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan politik Belanda. Pemerintah Belanda juga mengkhawatirkan hal ini akan memberikan dampak buruk bagi penduduknya serta orang asing yang berada di bawah jaminan keamanan kolonial Belanda. Namun demikian, banyak pihak yang melihat bahwa pertolongan pemerintah Belanda pada penduduk lokal merupakan sesuatu yang tidak biasa. Winchester pun mengasumsikan bahwa usaha-usaha pertolongan dan pemulihan pascabencana Krakatau yang salah satunya dipersiapkan di Rotterdam dan Amsterdam merupakan usaha Belanda untuk memulihkan kembali bisnis dan ekonominya agar dapat kembali bangkit setelah diguncang bencana.

Kecenderungan pemerintah Belanda untuk lebih dahulu menolong dan membantu korban berkewarganegaraan Belanda atau Eropa dan Asing juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik Belanda. Sedangkan apakah penduduk lokal memperoleh keuntungan dari usaha Belanda tersebut, semuanya tidak terlepas dari kedudukan Belanda sebagai penguasa di atas *Netherlands Indies*. Usaha Belanda terlihat dermawan, teratur, dan bermanfaat bagi masyarakat lokal, namun apa yang dilakukan Belanda tidak terlepas dari tuntutan Internasional. Bantuan dana yang banyak datang dari wilayah-wilayah nusantara serta negara-negara luar juga mempunyai harapan agar Belanda melakukan yang terbaik bagi korban bencana. Meskipun, pada akhirnya Belandalah yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari proses pemulihan pascabencana ini, seperti terbangunnya kembali banyak infrastruktur yang rusak, di mana infrastruktur ini sangat penting

untuk memperbaiki dan melancarkan kegiatan ekonomi Belanda dan asing di Banten dan Lampung. Kebutuhan kolonial (dalam bidang ekonomi) menyebabkan pemulihan pascabencana Belanda lebih banyak dititikberatkan pada perbaikan infrastruktur. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemulihan pascabencana pemerintah kolonial menitikberatkan pada pembangunan jalan raya, rel kereta api, gudang-gudang, jembatan, pembersihan perkebunan dan persawahan dari lumpur dan batuan, pembangunan pelabuhan dan sarana pendukung lainnya (pasar, bank, gedung pemerintahan). Menarik untuk dilihat apakah sebagian besar dana pembangunan ini diambil dari dana bantuan untuk korban bencana. Hal ini mengingat banyaknya bantuan dana yang mengalir, terutama dari nusantara serta didukung dunia internasional, adalah diiringi dengan harapan bahwa Belanda dapat membantu para korban bencana, baik penduduk lokal maupun asing. Namun, melihat jumlah dan jenis bantuan yang diberikan kepada penduduk lokal, tentunya banyak dana yang terserap untuk hal lain. Meskipun pemerintah Belanda membuat laporan keuangan untuk dilaporkan pada pemerintah pusat di Batavia dan Belanda, data laporan keuangan saat itu pun riskan dengan manipulasi. Dengan demikian, pemulihan pascabencana dengan menggunakan dana bantuan bencana untuk penduduk lokal tidak sepenuhnya efektif dikelola oleh Belanda.

## KESIMPULAN

Secara umum, kondisi penduduk lokal setelah peristiwa letusan Krakatau berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebelum peristiwa Krakatau, penduduk Banten dan Lampung sudah dalam keadaan miskin dan sulit. Kemudian, letusan Krakatau 1883 memperburuk keadaan ekonomi, menciptakan kemiskinan yang semakin luas dan krisis sosial (kelaparan, epidemik, dan kejahatan) sehingga menambah penderitaan rakyat di kedua wilayah tersebut. Setelah letusan Krakatau, penduduk lokal mengalami kekurangan bahan pangan dan kebutuhan primer lainnya, sehingga mereka memutuskan untuk bermigrasi dan menjadi kuli di wilayah-wilayah lain di sekitar Pulau Jawa dan Sumatra.

Banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur memaksa pemerintah Belanda mengambil tindakan pertolongan dan pemulihan pascabencana. Bagi pemerintah Belanda sendiri, membantu dan memulihkan kondisi masyarakat lokal menjadi penting karena begitu banyak bantuan logistik dan finansial yang mengalir ke kantung bantuan bencana yang dikelola oleh Belanda dan sebagian besar diperuntukkan untuk korban penduduk lokal. Pemberi bantuan (donatur) pun mengharapkan agar pemerintah

kolonial Belanda di Batavia bisa memberikan pertolongan dan pemulihan terbaik bagi rakyat kecil di koloninya. Dengan terus berjalananya informasi dan berita mengenai kondisi pascabencana melalui media telegraf, telah memaksa kolonial Belanda untuk menjaga kepercayaan publik sebagai negara kolonial yang bertanggung jawab terhadap koloninya. Meskipun demikian, masih banyak kebutuhan korban yang terlewatkan oleh pemerintah Belanda.

Selain itu, kondisi penduduk Banten yang telah lama mengalami tekanan dan kesulitan, terutama pascaperiode tanam paksa, dan telah mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama di negerinya sendiri, juga memaksa pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan sosial bagi penduduk lokal yang tertimpa bencana alam besar. Tekanan hidup yang telah berlangsung sebelumnya, seperti penyakit hewan ternak, penyakit demam pada masyarakat serta kelaparan akibat kegagalan panen, kemudian ditambah kembali dengan penderitaan pascabencana alam Krakatau, pada akhirnya menambah kesadaran beragama penduduk Banten dan Lampung. Kondisi ini yang kemungkinan besar juga mendorong pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan cepat pemulihan pascabencana untuk meredam kondisi lain yang dapat mengganggu ketabilan ekonomi dan politiknya.

Pemerintah Belanda sangat terbantu dengan mengalirnya bantuan yang diperuntukkan khusus bagi korban bencana yang sebagian besar adalah penduduk lokal. Pemerintah Belanda berusaha mensuplai penduduk lokal dengan beras, garam, sarung, selimut, alat memasak dan kayu serta atap rumah. Meskipun juga memberikan perlengkapan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat berupa hewan ternak, alat memancing dan menjahit, semua bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan seluruh penduduk lokal yang menjadi korban bencana. Kelaparan dan penyakit tetap berlangsung karena penyaluran ini berjalan lambat dan tidak merata dibandingkan pertolongan bagi penduduk asing yang jumlahnya diketahui dengan pasti.

Selat Sunda merupakan wilayah yang paling strategis secara politik dan ekonomi. Selat Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan yang ramai disinggahi oleh kapal-kapal dagang asing dan dua wilayah di Selat Sunda yang penting saat itu adalah Banten dan Lampung. Banten merupakan wilayah yang paling dekat dengan pusat politik kolonial, yaitu Batavia. Sebagai wilayah yang penting dan penghubung antara Jawa dan Sumatra, selain sebagai bandar dagang, kondisi yang stabil di wilayah Banten dianggap perlu. Wilayah Lampung sendiri merupakan wilayah yang

sangat penting bagi ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Banyak wilayah-wilayah di Sumatra ini memiliki daerah pertanian dan perkebunan yang penting, seperti lada, yang juga banyak dimiliki oleh pengusaha asing. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana Krakatau banyak ditekankan dalam hal infrastruktur karena dibutuhkan untuk menghidupkan kembali kegiatan bisnis Belanda dan menghindari menurun atau hilangnya keuntungan ekonomi kolonial. Selain itu, pemerintah Belanda ingin tetap mempertahankan kepercayaan para investornya (swasta asing).

Sebagai pemerintah kolonial, bantuan dan pemulihan pascabencana tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan penguasa kolonial. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemulihan kondisi pascabencana Belanda sangat menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan, rel kereta api dan jembatan, agar dapat kembali mengalirkan kebutuhan dan hasil perkebunan atau pertanian kolonial dan pengusaha asing lainnya. Pertolongan Belanda yang diberikan berbeda antara masyarakat lokal dan Eropa, terutama penduduk Belanda serta Cina, juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di wilayah Banten dan Lampung. Membantu dan memperbaiki kondisi masyarakat lokal setelah bencana merupakan sebuah usaha untuk meredam gejolak masyarakat yang sudah lama tertekan dan semakin tertekan setelah peristiwa bencana Krakatau.

Dengan demikian, usaha pemerintah Belanda untuk menolong korban dan memulihkan kondisi setelah bencana tidak sepenuhnya berhasil. Melewatkannya kebutuhan dan harapan masyarakat lokal menyebabkan kelaparan dan kesulitan hidup yang dialami penduduk lokal semakin besar. Pada akhirnya, hal ini semakin menumbuhkan, bahkan memperkuat semangat perlawanan terhadap pemerintah penjajah Belanda, terutama di wilayah Banten yang telah memiliki sejarah perjuangan dan perlawanan yang panjang dalam melawan kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, Paramita R. 1983. "Family Histories in relation to the Volcanic Eruption of Krakatau in 1883," Symposium 100 Years Krakatau 1883-1983, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, 23-27 Augustus 1983.
- Bryant, Edward. 2005. *Natural Hazards*, Cambridge University Press.

- Carey, S. H. Sigurdsson, C. Mandeville, and S. Bronto. 2000. "Volcanic hazards from pyroclastic flow discharge into the sea: Example from 1883 eruption of Krakatau, Indonesia," in Floyd W. McCoy and Grant Heiken (Ed), *Volcanic Hazards and Disasters in Human Antiquity*, The Geological Society of America, Special Paper 345, 2000.
- Decker, Robert W. and Barbara B. Decker, 1991. *Mountains of Fire: the Nature of Volcanoes*, Cambridge University Press.
- Encyclo. 2009. Online Encyclopedie, <http://www.encyclo.nl/begrip/Pikol>, 21 Mei 2009.
- Furneaux, Rupert. 1964. *Krakatoa*, Prentice-Hall Inc.
- Hakim, Abdul. 1981. *100 Tahun Meletusnya Krakatau, 1883-1983*, Pustaka Antar Kota, Jakarta: Pustaka Antar Kota.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Lapian, A.B. 1987. "Bencana Alam dan Penulisan Sejarah: Krakatau 1883 dan Cilagon 1888," dalam T. Ibrahim, H.J. Koesoemanto, Dharmono Hardjowidjono, Djoko Suryo (Ed), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirjo*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Simkin, Tom and Richard S. Fiske. 1983. *Krakatau Eruption 1883: the Volcanic Eruption and Its Effects*, Washington D.C, United States: Smithsonian Institution Press.
- Suryadi, Syair. 2008. *Lampung Karam, Image of the 1883 Eruption of the Krakatau Mountain in a Classical Malay Literary Text*, 24<sup>th</sup> ASEASUK Conference, Liverpol John Moores University, Peter Josh Conference Center, 20-22 June.
- Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Eerste Stuk*, Batavia, G. Kolff & Co., 1884.
- Verslag van het Centraal Comite voor de Noodlijdenden door de Uitbarsting op Krakatau, Tweede Stuk*, Batavia, G. Kolff & Co., 1884.
- Winchester, Simon. 2003. *Krakatoa, the Day the World Exploded 27<sup>th</sup> August 1883*, Viking – Penguin Books.
- \_\_\_\_\_. Satuan-satuan Ukuran pada Masa Kerajaan, 2009, <http://www.wacananusantara>. 6 Maret 2009.